



LHP BPK RI 2015

Bupati Melawi Targetkan WTP

Borneo Tribune, Nanga Pinoh

LHP BPK RI terhadap laporan keuangan Kabupaten Melawi tahun ini ternyata masih berpredikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Persoalan aset menjadi salah satu kendala Melawi untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Sebenarnya Melawi bisa mendapatkan WTP kalau pengelolaan asetnya tidak ada masalah. Maklum kita inikan daerah pemekaran. Jadi masih ada beberapa aset yang perlu untuk dibenahi. Ke depan target kita harus WTP," ujar Bupati Melawi, Firman Muntaco, belum lama ini.

Sejak Kabupaten Melawi berdiri, baru dua kali laporan keuangannya mendapatkan opini WDP. Sedangkan beberapa tahun sebelumnya predikat yang diberikan BPK RI adalah Tidak Wajar. Dengan pencapaian tersebut, Bupati Firman mengaku saat ini sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sebelumnya.

Sejumlah aset Pemerintah Kabupaten Melawi yang masih bermasalah adalah mengenai sertifikasi tanah yang kini sudah didirikan sejumlah bangunan. Seperti rumah sakit umum daerah Melawi. Bahkan ada beberapa tanah yang sampai kini belum memiliki sertifikat resmi.

Sementara itu, terkait soal aset, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi, Ramda Suhaimi mengungkapkan, untuk membenahi persoalan aset langkah yang akan dilakukan adalah melakukan pendataan kembali terhadap sejumlah aset yang belum ada nilainya.

"Seperti soal aset tanah hibah dari Kabupaten Sintang. Inikan ada beberapa yang belum ada nilainya. Nanti akan kita proses kembali nilai-nilainya berapa harganya tanah ini, termasuk menghapuskan sejumlah aset yang kemungkinan usianya sudah tidak memungkinkan lagi," ujar Sementara itu, terkait soal aset, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Melawi, Ramda Suhaimi.

Ramda optimis, dengan perbaikan atau penataan aset Melawi bisa meraih WTP sesuai dengan yang diharapkan Bupati. Sebab selain mempermudah proses administrasi, WTP memang sudah menjadi target pemerintah.

"Target kita memang WTP. Karena beberapa catatan dari BPK kemarin memang soal aset. Untuk sekarang memang laporan aset setiap bulan kita sampaikan. Jadi kita juga berkoordinasi dengan setiap SKPD sehingga saat pemetaan bermasalah bisa segera kita selesaikan," timpalnya.

Menurutnya, koordinasi dengan setiap SKPD perlu dilakukan. Karena memang DPPKAD merupakan himpunan setiap SKPD. Maka dari itu koordinasi dan kerjasama perlu dilakukan agar apa yang diharapkan bisa tercapai.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Kluisen berharap, kepada Pemerintah Kabupaten Melawi melalui SKPD bisa segera membenahi persoalan yang dihadapi. Agar keinginan untuk mendapatkan WTP bisa terwujud.

"Harus diupayakan. Apa yang menjadi masalah sehingga menghambat persoalan itu, seperti masalah rumah sakit ini juga harus segera diperbaiki. Supaya pelayanan di sana menjadi lebih baik," harapnya.

Namun, kata Kluisen, perbaikan administrasi dan aset yang dilakukan pemerintah jangan hanya karena ingin mengejar WTP. Melainkan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak sehingga dampaknya juga dirasakan.

"Kalau mendapatkan WTP, namun pelayanan masih sama saja. Kan tidak ada gunanya. Harus yang diutamakan adalah kepentingan masyarakat," lugasnya. (eko)